

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyusunan Tim Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang tertera pada lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penguatan Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan hasil yang diharapkan sebagai berikut:

a. Tugas:

- 1) memperbaiki sistem perencanaan kebutuhan pegawai secara berkelanjutan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) merumuskan dan menetapkan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan berbasis kompetensi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3) merumuskan dan menetapkan kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4) merumuskan dan menetapkan kebijakan pemanfaatan *assesment center*;
- 5) merumuskan dan menetapkan kebijakan penilaian kinerja pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 6) merumuskan dan menetapkan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 7) membangun/mengembangkan sistem informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8) merumuskan dan menetapkan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9) merumuskan dan menetapkan kebijakan pemanfaatan /pengembangan *data base* profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 10) merumuskan dan menetapkan kebijakan pengendalian kebijakan pengendalian kualitas pendidikan dan pelatihan (diklat) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 11) menerapkan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh semakin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
- 12) menyusun dan menetapkan karir pegawai ASN;
- 13) mengukur *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; dan
- 14) memperkuat sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.

b. Hasil yang diharapkan dari Tim adalah :

- 1) tertatanya sistem pengelolaan sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) meningkatnya integritas Sumber Daya Manusia ASN di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3) meningkatnya netralitas Sumber Daya Manusia ASN di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4) meningkatnya kesejahteraan Sumber Daya Manusia ASN di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5) meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia ASN di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 6) meningkatnya transparansi dalam rekrutmen pegawai ASN di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7) meningkatnya ketepatan perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan dengan kompetensi dan kualifikasi calon pegawai/pejabat ASN di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- 8) meningkatnya profesionalisme pegawai ASN di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (Sebelas) Bulan terhitung dari Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penguatan Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
5. PPK yang bertugas di pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENGUATAN
SISTEM MANAJEMEN SUMBER
DAYA MANUSIA APARATUR
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 79 TAHUN 2016

TANGGAL : 11 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	: Reifeldi	750.000
2.	Ketua	: R. Fendy Dharma Saputra	650.000
3.	Anggota	: 1. Windy Dian Trisari 2. Jhon Piter H. Situmorang 3. Festiana Niyanti 4. Adreng Kusuma Ayuningtyas 5. Arso Hadi Wardono 6. Sulmiari 7. Angky Dwi Seffyanto 8. Ermawanto 9. Intan Dana Lestari 10. Katriasih Dwi Hartati 11. Prima Salti 12. Setiawan Rahandi Sabri 13. Hilma Oktaviani 14. Mario Duwi Cahyo 15. Pejabat/Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO